

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Persoalan pemanfaatan hutan sebetulnya sangatlah kompleks dan mencakup banyak kepentingan. Pemanfaatan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia memang tidak semata-mata karena faktor ekonomi. Motif ekonomi semacam penekanan pada peningkatan devisa memang menjadi salah satu faktor saja sebab harus diakui pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) lapisan masyarakat tradisionalpun dipandang bertanggung jawab dalam perambahan dan perusakan hutan karena faktor ini.

Motif untuk mempertahankan hidup sering kali menempatkan pihak-pihak yang peduli dalam penyelamatan lingkungan dalam kondisi yang dilematis. Karena aksi yang dilakukan oleh masyarakat perambah hutan dilatarbelakangi motif untuk sekedar bertahan hidup (*struggle of life*). Sehingga dalam hal ini para pelestari lingkungan hidup menghadapi kendala sosial yang cukup rumit.

Indonesia jelas mengalami kesulitan besar dalam menghadapi kerusakan hutan. Kerusakan yang cukup mengawatirkan bagi kelangsungan ekosistem dan sosial. Penebangan hutan serta penjarahan hasil hutan yang hanya berorientasi pada ekonomi serta pemanfaatan jangka pendek menjadikan kerusakan semakin parah. Peningkatan dalam penebangan hutan yang dilakukan dalam semangat liberalisasi serta pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu hal ini. Menteri Kehutanan (Menhut) M. Prakosa mengungkapkan, jumlah kerugian negara akibat kerusakan hutan secara nasional mencapai Rp 3 triliun, sehingga diperlukan upaya keras untuk menyuburkan kembali hutan di Indonesia. Kerusakan hutan terjadi di semua provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan maupun DI Yogyakarta (Antara, 2004).

Kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan yang serampangan dan cenderung meminggirkan komunitas sekitar hutan menimbulkan problema pelik. Solusinya pemerintah melibatkan komunitas dan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ide untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan ini tertuang dalam gagasan membangun Hutan Kemasyarakatan. Ide ini diajukan ketika disadari masyarakat sekitar hutan ternyata tidak dapat ikut menikmati hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton dari eksploitasi hasil hutan. Hutan Kemasyarakatan dikembangkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengakses sumber daya hutan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ekonomi.

Pemanfaatan hutan yang memberikan akses pada masyarakat sekitar hutan dalam hutan kemasyarakatan ini perlu kita lihat dari kacamata yang lain. Cara pandang yang coba dipakai adalah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Cara pandang ini melihat bahwa pembangunan konvensional hanya menempuh satu jalur saja, yakni pembangunan ekonomi saja. Sedangkan pembangunan berkelanjutan mencoba mengkolaburasikan antara tiga unsur yaitu, sustainabilitas ekonomi, sustainabilitas sosial, dan sustainabilitas ekologi-lingkungan (Salim, 2002).

Usaha ini perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat berlanjut, serta meningkat, tetapi perlu diperhitungkan dampaknya pada berkelanjutan kehidupan masyarakat sosial yang ditopang keberlanjutan fungsi ekologi-lingkungan. Semangat pengembangan hutan ini melihat dengan cara konservasi lingkungan bagi kesejahteraan, dimana konservasi dilihat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada saat ini, tetapi tetap mempertahankan keberadaannya di waktu yang akan datang. Oleh karenanya konservasi akan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan yang menjadi pijakan *sustainable development* (Dewi, 2003).

Pemanfaatan hutan dengan pelibatan komunitas disekitar hutan memang patut didukung tetapi juga patut kita kritisi bersama. Semangat yang muncul dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan ini sebenarnya yang menjadi catatan kita. Ide ini ketika hanya berpijak dengan pelibatan serta peningkatan masyarakat dalam melakukan akses terhadap hutan yang hanya meningkatkan ekonomi saja dapat menjadi bumerang bagi kelestarian hutan itu sendiri. Pendekatan ini akan memungkinkan timbulnya kerusakan hutan. Keinginan kita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan jauh dari kenyataan. Catatan kritis dalam ide hutan kemasyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan hutan dengan pelibatan masyarakat sekitar hutan antara lain :

Pertama, dari sisi ekonomi ternyata masyarakat tetap dalam kondisi dirugikan. Partisipasi yang musti dilakukan ternyata susah diwujudkan, marginalisasi masyarakat karena pendidikan rendah mereka jelas hanya menjadi buruh kecil (pengolah lahan hutan tetapi minim otoritas) dengan pendapatan kecil juga. Pelibatan masyarakat hanya dilakukan dengan semangat agar masyarakat mau menjadi "satpam" dengan bayaran murah kalau tak mau disebut gratis dalam menjaga keutuhan hutan. Dimana karena semangat ini jelas bahwa posisi masyarakat kelewat lemah karena mereka memang hanya dipandang sebagai buruh dan pekerja oleh Negara.

Kedua, dari sisi sosial-politik, pembangunan dilakukan dengan minimnya kelibatan masyarakat dalam melakukan tawar-menawar hasil misalnya. Dimana masyarakat hanya dijadikan kambing congek yang wajib menaati keputusan penguasa (Modal, Negara). Ini jelas hanya menjadikan masyarakat semakin tersisih dalam sistem sosial yang ada. Ini terjadi karena mereka hanya sekedar pengelola tetapi tidak cukup memiliki posisi tawar dengan Negara. Terutama dalam melakukan negosiasi seberapa hak dan kewajiban mereka.

Ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, maupun peningkatan pendapatan negara, jelas meminimalkan semangat ekologis. Dimana

dalam pandangan peningkatan ekonomi maka yang menjadi catatan penting adalah Negara mendapat berapa, masyarakat mendapatkan apa dan ekosistem hutan akan bertambah parah dengan sendirinya hutan kemudian tetap rusak.

Beberapa catatan diatas dalam pengembangan hutan kemasyarakatan ini memang sebuah perenungan kritis yang layak disimak serta kemudian kita tindak lanjuti, sehingga ide yang pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan bukan menjadi sebuah penjarahan baru dalam bentuk penjarahan dengan aktor (baru) yang lebih banyak maupun cara (baru). Maka semangat yang perlu sekali ditanamkan dalam masyarakat, aktivis penggiat, maupun pemerintah pelaksana hutan kemasyarakatan adalah semangat pembangunan berkelanjutan *sustainable development* yang sadar ekologi dan konservasi hutan.

Penelitian ini diharapkan mampu melihat bahwa pemanfaatan hutan ke depan bukan menjadi perusakan hutan dengan aktor yang lebih banyak. Kalau dulu penjarahan hanya oleh pemegang HPH atau para penjarah hutan resmi, tetapi sekarang penjarahan melibatkan aktor yang lebih banyak. Hal ini mungkin terjadi sekaligus dengan penjarahan hutan dengan cara baru. Bahaya ini dapat muncul ketika pemanfaatan hutan dengan munculnya ide pelibatan masyarakat dalam pengembangan hutan tanpa semangat konservasi dan memahami fungsi hutan. Maka ide yang muncul dalam Program Hutan Kemasyarakatan akan sia-sia ketika tidak dilakukan pula dengan semangat *sustainable development*.

Penelitian ini kemudian memfokuskan pada satu hal yang mendorong pengembangan Hutan berkelanjutan adalah kondisi yang mendukung untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kriteria ini akan dilihat kebijakan, rencana serta kerangka pikir kelembagaan yang konduktif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kebijakan dalam hal ini adalah berkaitan dengan produk peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya pengaturan operasionalnya dalam implementasi (Suharjito,dkk., 2000).

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan ini ternyata juga dilakukan oleh masyarakat di Gunung Kidul maupun di Kulon Progo. Dimana hutan kemasyarakatan yang paling dinamis dan berjalan di seluruh Indonesia yaitu Hkm (Hutan Kemasyarakatan) di Gunung Kidul, dimana di daerah lain hanya cenderung berebut dan bersifat proyek (Awang, 2004). Catatan kenapa wilayah Gunung Kidul perlu dilihat dalam penelitian ini, karena dimilikinya beberapa karakteristik yang cukup menarik dilihat; pertama, telah muncul kelompok masyarakat disekitar hutan yang berusaha melakukan pengelolaan hutan, komunitas sekitar hutan ini membentuk kelompok Tani Hutan yang kemudian bergabung dalam Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan (Rahman, 2004). Kedua, di wilayah Gunung Kidul nampak jelas batas antara penguasaan hutan rakyat dan hutan Negara. Ketiga, Penyelenggaraan HKm mendapat dukungan dari pemerintah daerah dengan keluarnya SK Bupati No 213/KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (di Gunung Kidul). Keempat Kondisi wilayah Gunung Kidul yang rawan lingkungan. Wilayah Gunung Kidul yang miring dan tandus (wawancara Kasi Konservasi).

B. Perumusan Masalah.

Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam program Hutan kemasyarakatan (HKm) patut dikritisi. Pelibatan dan pengelolaan dalam prespektif ekonomi saja dapat menjadi bumerang bagi ekologi dan masyarakat. Sehingga ide yang mencoba melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan hutan bukan menjadi sebuah penjarahan baru dalam bentuk penjarahan dengan aktor yang lebih banyak maupun cara baru. Kebijakan ini patut dilihat dengan kaca mata pembangunan berkelanjutan terutama kebijakn serta implemetasinya apakah mampu mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan kesadaran ekologi muncul dalam kebijaksanaan pemerintah.

Melihat beberapa catatan di atas dari pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di wilayah Gunung Kidul yang dicoba dikembangkan, serta kondisi geografis tersebut patutlah bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan **“Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengelolaan hutan melalui HKm kondusif bagi pengembangan hutan berkelanjutan?”**

Pertanyaan ini dipertajam lebih lanjut dengan pertanyaan yang lebih mikro:

1. **Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm), bersifat *enabling* bagi pengelolaan hutan berkelanjutan?**
2. **Apakah sifat *enabling* yang ada pada pemerintah direspon secara positif dalam implementasi kebijakannya?**

C. Batasan masalah.

Penelitian ini kemudian memfokuskan pada satu hal yang mendorong pengembangan Hutan berkelanjutan adalah kebijakan atau kondisi yang mendukung untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kriteria ini akan dilihat kebijakan, rencana serta kerangka pikir kelembagaan yang kondusif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan pada **Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.**

D. Tujuan penelitian.

1. Mendapatkan gambaran kebijakan negara yang memfasilitasi pengembangan Hutan berbasis rakyat yang berkelanjutan.

2. Penelitian ini dilakukan dalam pijakan untuk mengetahui perbedaan serta persamaan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan kebijakan pemerintah Pusat..

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengantar

Kebijakan ekonomi tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan menempatkan sumber daya hutan hanya sebagai komoditas ekonomi. Sumber daya hutan hanya diperuntukkan sebagai penghasil kayu (*timber*). Pengelolaan sistem hutan ini ada dua cara pandang. Pertama, cara kelola yang lebih dikenal dengan *timber extraction* (penambangan kayu). Sistem yang pertama ini memang berpandangan bahwa hutan sebagai warisan leluhur (merasa tidak menanam) adalah sumber daya yang sangat potensial untuk menumbuhkan perekonomian negara, maka dapat ditambah dieksploitasi untuk sebesar-besar devisa negara. Atau dengan kata lain hutan untuk penambangan kayu dengan tujuan komersial bukan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.

Kedua, cara kelola yang disebut *timber management* (pengelolaan kayu). Dimana cara pandang yang kedua ini telah menerapkan pengelolaan hutan agar dapat menjaga kelestarian produk hutan. Dan dua sistem ini awalnya memang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan dapat menghasilkan devisa yang tinggi dari hasil kayu. Di sisi ini nampak bahwa pemanfaatan hutan secara ekonomi nampak dominan. Pemanfaatan hutan dengan cara ini ternyata mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi yang kemudian muncul masalah adalah tenaga yang digunakan bukan berasal dari komunitas sekitar hutan tersebut. Pelibatan komunitas yang minim ini yang kemudian mendorong munculnya konflik dalam pengelolaan

Di sisi lain kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan tersebut terus bertambah tanpa diimbangi dengan penanaman kembali yang baik. Singkat kata dua sistem ini telah meninggalkan faktor-faktor lain seperti sosial dan ekologi atau dua faktor tersebut menjadi bagian yang tidak penting. Pemanfaatan hutan dengan cara ini yang menjauhkan komunitas dan ide konservasi hutan yang menjadi cara pandang utama pembangunan hutan di Indonesia era dulu sampai beberapa dekade. Sistem ini terbukti gagal membawa pembangunan hutan yang berkelanjutan. Hutan mengalami kerusakan yang maha dasyat.

Beberapa catatan dimuka yang nampak menggambarkan bahwa cara kelola hutan sudah meminggirkan komunitas sekitar hutan dan pemanfaatan cenderung merusak dan sangat eksploitatif. Muncul kesadaran dan pergeseran paradigma pembagunan hutan yang sebelumnya menganut *timber management* dan sistem pengelolaannya yang sejenis tanpa memperdulikan faktor-faktor sosial kemudian bergeser ke paradigma *sosial forestry (SF)* dan *community forestry(CF)*. Dari sini mulailah faktor-faktor ekologi dan sosial mulai diperhatikan serius, karena faktor sosial dan ekologi merupakan dua faktor yang sangat penting demi pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable*). Sehingga berkembanglah apa yang disebut pembangunan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Hanya saja retorika pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan melibatkan masyarakat masih dalam dataran wacana. Belum menjadi jiwa dan kebutuhan bersama semua pihak sehingga sampai sekarang kerusakan hutan pun masih menjadi dominasi wacana kita (Sepsiaji dan Fuadi, 2004).

HKm sebagai sebuah program kerja yang dilontarkan pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola hutan. Cara yang dilakukan untuk berbagi hasil maupun fungsi dengan masyarakat demi kesejahteraan. Ikhtiyar inilah yang akan kita lihat peran pemerintah maupun potensi mayarakat macam apa yang mapu mendukung program ini mapu meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan.

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif eksploratif untuk mengungkap terhadap Program Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam prespektif *sustainable development*. Pengembangan hutan dalam program hutan kemasyarakatan sudah selayaknya dilakukan pengkritisan serta penelitian yang baik. Terutama manfaat serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengembangan hutan tersebut. Se jauh mana masyarakat dapat mengakses serta memanfaatkan program tersebut bagi peneingkataan kesejahteraan. Dengan didukung kebijakan yang *enabling* dari pemerintah dalam program ini.

2. Program Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari dan mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Dep Hut, 2001). Dimana ide ini muncul dalam perkembangan wacana hutan harus mampu mensejahterakan masyarakat, atau hutan memiliki fungsi sosial (*sosial forestry* (SF) dan sekaligus dimulai munculnya pandangan tentang hutan harus dapat mensejahterakan dan memberikan akses terhadap komunitas sekitar hutan. Ide ini dikenal sebagai *community forestry* (CF)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan sekian dari program-program pemerintah yang diklaim telah membela dan memperhatikan masyarakat sekitar hutan. Program-program lainnya yang dapat dikatakan sejenis seperti HPH Bina Desa (1991), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 1995, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diusung PT. Perhutani (waktu itu Perum Perhutani).

Pertama kali kebijakan HKm dicanangkan pemerintah sebagai salah satu proyek nasional pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya SK Menhut No 622/Kpts-II/1995. Kebijakan HKm ini terus mengalami perubahan dengan keluarnya kebijakan kehutanan di Departemen Kehutanan. Kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm) telah mengalami

perubahan sampai dua kali. Perubahan pertama yaitu menjadi SK 677/Kpts-II/1998 dan yang kedua menyesuaikan dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang sampai sekarang masih berlaku yaitu SK Menhut 31/Kpts-II/2001.

Jadi jelas bahwa program Hutan kemasyarakatan merupakan pengembangan hutan dengan melakukan pelibatan komunitas atau kelompok sekitar hutan. Program ini dititikberatkan pada semangat peningkatan pendapatan komunitas sekitar hutan. Walaupun pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa program ini harus tetap memperhatikan ketahanan dan kelestarian dari ekosistem hutan. Kesuksesan program HKM inilah yang perlu didorong dengan melihat kesungguhan pemerintah maupun masyarakat dengan segala potensinya.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)

Konsep keberlanjutan pertama kali muncul dalam pertemuan **United Nations on Human Environment**, tetapi baru dideklarasikan sebagai sebuah ide internasional dalam pembangunan oleh **World Commission on Environment and Development (WCED)** dalam deklarasi **Our Common Future**. Pada tahun 1987. Di dalam pertemuan ini kemudian mulai dikenal istilah *sustainable development (SD)*. Dalam kesepakatan forum yang dikeluarkan WCED ini lebih dikenal sebagai **Brundtland Report**. Dalam *report* ini nampak munculnya perdebatan antara global environmental, ekonomi dan sosial, terutama dalam melihat mana dulu yang lebih utama.

SD menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan **United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)** di Rio De Janeiro, Brasil pada bulan Juni 1992. Pada pertemuan internasional UN yang diikuti oleh lebih dari 150 anggota UN dimana banyak delegasi yang hadir dipimpin oleh kepala negaranya¹. Sebuah pertemuan cukup prestis dan

¹ Konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan ini kemudian diingat dengan konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*). Diikuti oleh kepala negara, utusan badan-badan PBB dan Organisasi Internasional dan NGO, dengan peserta 176 negara hadir.

penting untuk melihat Perubahan iklim global dan keanekaragaman hayati. Dalam pertemuan ini kemudian dikeluarkan sebuah kesepakatan tentang sebagai prinsip SD (dikenal pula sebagai *RIO Declaration*). Dimana detail dan penjelasan tentang hasil ini disebut dalam AGENDA 21. Konskuensi dari pertemuan UNCED ini UN membentuk sebuah badan baru yang disebut *Commision for sustainable development* atau komisi untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam melakukan pembangunan berkelanjutan ini kemudian tercipta kesepakatan bahwa peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama (pemerintah, NGO, Lembaga donor). Untuk memahami pembangunan yang berkelanjutan kemudian dibuat beberapa prinsip dasar dari SD tersebut. Prinsip dasar itu antara lain (Kinrade, 1996) ;

- a. Peningkatan partisipasi dan akses individu maupun kelompok dalam proses ekonomi demi peningkatan kesejahteraan tanpa mengurangi hak dari generasi mendatang.
- b. Menjamin tersedianya sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan antargenerasi.
- c. Melindungi keanekaragaman hayati dan pengaturan sistem dan proses lingkungan hidup.
- d. Pengakuan dan penghormatan dimensi Global.
- e. Pendekatan kebijakan yang antisipatif dan pencegahan (preventif)

Dalam memahami prinsip ini terdapat beberapa definisi dari SD yang dikemukakan. SD menurut Koesnadi adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya (Koesnadi, 1996). Sedangkan menurut Otto Soemarwoto SD dilihat sebagai pembangunan yang bisa melestarikan dan mensejahterakan manusia tanpa harus merusak alam. Maka dari itu suatu pembangunan terlanjutkan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan ekonomi, tetapi juga persyaratan sosial budaya dan ekologi (Soemarwoto, 1992).

Sehingga nampak bahwa SD (*sustainable development*) adalah cara pandang dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan, berkelanjutan secara ekologis, ekonomi dan sosial, dengan melakukan keadilan akses terhadap individu maupun kelompok secara sama. Dimana SD juga harus menghormati hak generasi mendatang untuk tetap mendapatkan sumber daya alam, serta melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

4. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM)

Dalam pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan adanya keberpihakan dan pengakuan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam tetapi juga yang terpenting adalah keselamatan dari Ekosistem yang perlu dijaga. Sehingga ide penegelolaan hutan sudah selayaknya memperhatikan gagasan tentang keberlanjutan. Keberlanjutan dalam pengelolaan hutan dimana dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang terpenting adalah peran dalam menciptakan keadilan social, misalnya pengurangan kemiskinan, tetapi juga perlu diperhatikannya keberlanjutan kelola secara ekologis.

Gagasan pemanfaatan sumber daya hutan dalam program hutan kemasyarakatan sudah sangat tepat ketika meletakkan aspek keadilan dan peningkatan ekonomi demi mengurangi kemiskinan. Tetapi yang perlu diingat kemudian adalah kelestarian ekosistem. Sehingga perlu sebuah pengembangan hutan dengan melihat manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penegelolaana yang pada dasarnya mencoba mengkolaburasikan fungsi hutan secara ekonomi dengan peningkatan akses rakyat dalam hutan sekaligus mencoba menjaga ekosistemhutannya.

Maka program HKm sudah seharusnya dilakukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Yang dalam buku *The Sustainable Forestry Hand Book* (Hieman Ed al

1999) terdapat pengertian tentang manajemen atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai :

"The Sustainable Forestry is the process of managing forest to achieve one or more clearly specified objectives of management with regard to the production of to continuous flow of desired forest products and services, without undue reduction of its inherent values and future productivity and without undue undesirable effects on the physical and social environment"

Atau menurut Wiersum (1995) bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan cara yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan kelola hutan, dimana pengelolaan yang berkelanjutan ini dilakukan dengan cara pemanfaatan hutan yang paling mungkin (*utilise to the possible extent*) tetapi juga dilakukan kebutuhan dari generasi yang akan datang, atau pemanfaat hutan dengan tetap memperhatikan adanya keberlanjutan kebutuhan generasi mendatang (*Future generation needs*).

Bahkan menurut gagasan dari World Commission on Environment and Development melihat bahwa SFM *"a set of objectives, activities and outcome consistent with maintaining or improving the forestry's ecological integrity and contributing to people's well-being both now and in the future."*

Dalam beberapa gagasan SFM tersebut nampak bahwa pengelolaan hutan sudah selayaknya dilakukan dengan tetap melihat keberlanjutan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan hutan bukan hanya dilakukan untuk generasi sekarang. Generasi ini tidak layak merasa yang paling berhak dalam pemanfaatan hutan, tetapi sudah selayaknya dilakukan dengan melihat kebutuhan generasi berikutnya. Termasuk dalam pengelolaan hutan tersebut jaga perlu dilakukan adanya pengelolaan dari para aktor (pelaku). Seberapa mereka kemudian mau mengkompromikan gagasan ini agar hutan tetap lestari.

Sehingga dalam pengembangan HKM kedepan pendekatan tersebut (pembangunan berkelanjutan) dalam SFM, sudah seharusnya dilakukan. Pendekatan ini pula yang akan digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Dalam diagram nampak beberapa kriteria yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

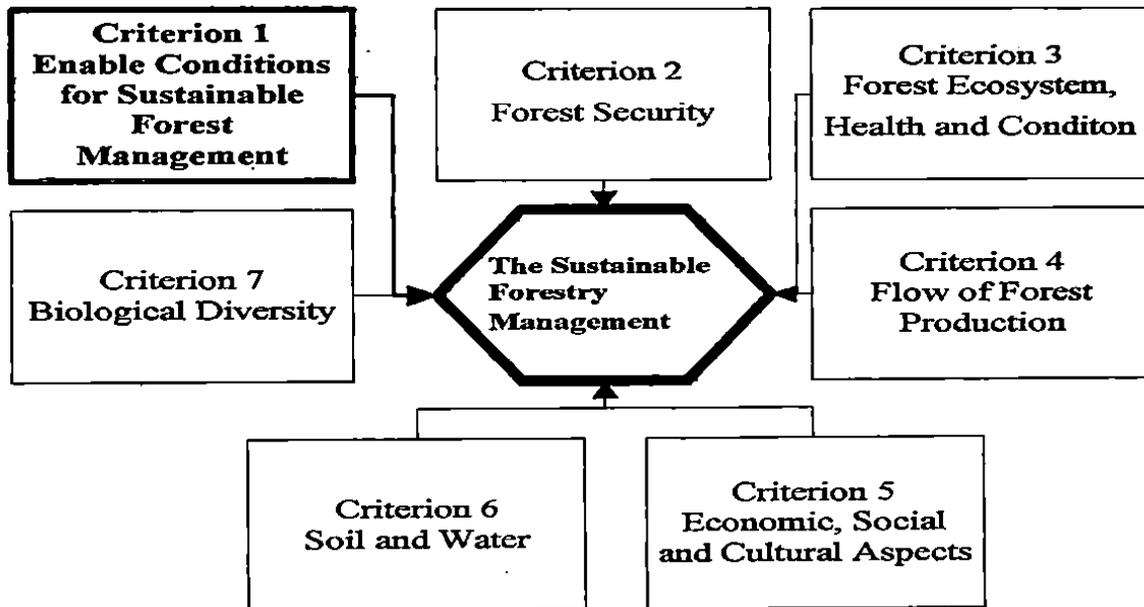


Diagram I
Pengembangan SFM

Sumber ITTO (International Tropical Timber Organization)1999

Dari diagram diatas penelitian akan Fokus dengan melihat 1 (satu) kriteria saja untuk pengembangan HKM ini. Kriteria pertama yang coba dilihat adalah kondisi yang mendukung untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kriteria ini dilihat dengan kebijakan rencana serta kerangka pikir kelembagaan yang konduktif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan (Prabhu, etc., 1996). Kondisi yang memungkinkan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan salah satunya dilihat dari kebijakan yang mendukungnya. Dalam paparan ini

.....

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan dalam hal ini adalah berkaitan dengan produk peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya pengaturan operasionalnya dalam implementasi (Suharjito, dkk., 2000). Produk perundangan yang berorientasi pada komunitas maupun masyarakat cukup banyak. Orientasi dari kebijakan ini dapat dilihat sebagai acuan tentang seberapa besar konsen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDH. Lebih fokus dalam kebijakan kehutanan masyarakat.

Kebijakan ini akan dilihat serta dipengaruhi dari cara pandang Negara dan rakyat tentang SDA. Cara pandang yang pertama perlu kita lihat adalah bagaimana sebenarnya posisi hutan didalam kaca mata negara dan rakyat. Pembahasan sistem pengelolaan sumber daya hutan secara keseluruhan di Indonesia, harus diawali dengan melihat cara pandang pemerintah (negara) terhadap sumber daya hutannya. Pandangan negara terhadap hutan sebagai aset publik (*public domain*) dan penguasannya sebagai aset negara, mencerminkan bentuk hubungan negara dengan rakyatnya. Pemerintah sebagai wakil negara mengatur sumber daya hutan dan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui seperangkat kebijakan dengan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bila dalam pengaturan itu secara langsung bisa dinikmati oleh masyarakat, berarti hutan bermakna sebagai fasilitas publik yang dikelola oleh negara. Sementara di sisi lain, hutan bisa bermakna sebagai hak kepemilikan individu.

Sifat *enabling* ini bisa dilacak di dua lapis pemerintahan, yakni Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul). Dalam rangka melacak sifat kebijakan pemerintah ini, di kedua pemerintahan ini peneliti akan melacak beberapa hal.

Pertama, penyesuaian-penyesuaian (*pelonggaran* tingkat pusat dan *pelonggaran* di tingkat lokal) kendali pemerintah dalam rangka penyelenggaraan HKM. Pelacakan akan difokuskan pada perubahan peraturan perundang-undangan.

Kedua, adanya kejelasan kerangka kelembagaan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan melalui HKM. Dalam rangka ini peneliti akan mereview tata kelembagaan yang ada untuk menopang kelancaran pelaksanaan program HKM.

Ketiga, tercukupinya sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan HKM. Dalam rangka ini akan dikaji alokasi anggaran, personalia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kesuksesan HKM.

Pemilihan indikator dalam penelitian ini dilakukan untuk memudahkan dalam melihat pengelolaan HKM oleh masyarakat yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran penelitian ini terlihat dalam diagram berikut :

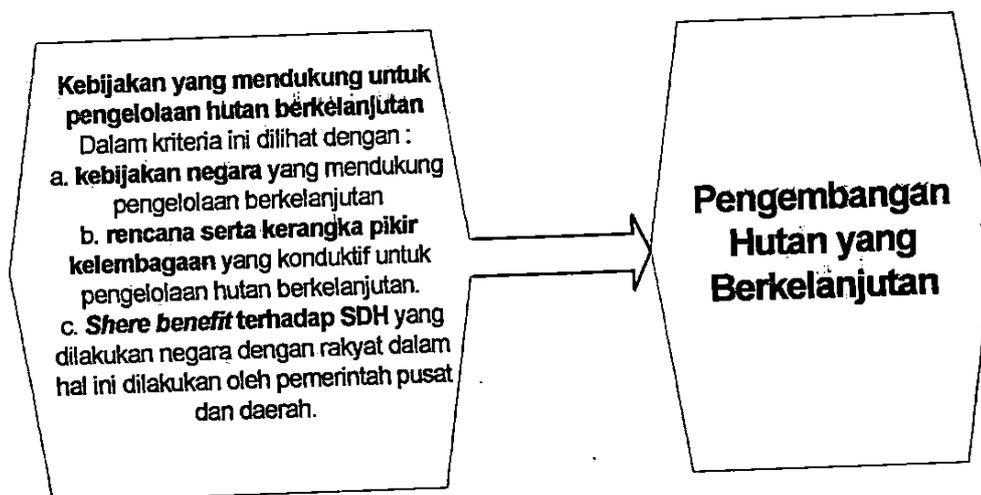


Diagram II
Kerangka pemikiran Penelitian

Penelitian ini fokus pada kriteria tersebut untuk memudahkan dalam melakukan pencarian data maupun pengolahan data yang akan dilakukan. Pemilihan kriteria tersebut

bukan berarti meminggirkan kriteria yang lain. Semua ini demi fokus serta kedalaman dari penelitian ini semata, karena penelitian ini melihat kriteria tersebut merupakan kriteria yang signifikan mempengaruhi pengembangan hutan yang berkelanjutan.

E. Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional

1. Defenisi Konseptual

Pengelolaan hutan berkelanjutan adalah proses pengelolaan hutan yang dilakukan dengan pengoptimalan sumber daya hutan dengan cara memperhatikan keutuhan ekosistem, sekaligus dilakukan dengan tetap memperhatikan kesediaan SDA hutan bagi generasi mendatang. Keberlanjutan ini dilakukan dengan melihat salah satu aspek penting. Aspek pertama enabling kondisi atau kebijakan yang mendukung HKm berkelanjutan.

2. Defenisi Operasional

Pengelolaan hutan yang dilihat dari beberapa Indokator yang ada :

Kondisi yang memungkinkan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Disini ada beberapa indikator yang dilihat :

Fungsi *enabling* Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul).

- Penguatan kendali
 - Adanya kepastian hukum dan kebijakan dari pemerintah
 - Adanya penetapan yang jelas antara lahan untuk produksi, dan lahan untuk konservasi.
- Kejelasan kerangka kelembagaan
 - Adanya kepastian tentang kepemilikan atau pemakaian tanah negara (hak kelola)
 - Adanya kejelasan tentang siapa yang memiliki hak serta kewajiban dalam pengelolaan

- Kecukupan sumberdaya
- Peraturan dan norma-norma pemanfaatan sumberdaya hutan terus dimonitor dan tetap dilaksanakan.

Beberapa indikator tersebut diatas yang kemudian akan dilihat dalam penelitian ini. Tetapi patut dicatat bahwa indikator yang akan dilihat sebagai kerangka pikir dari penelitian ini bukan merupakan harga mati. Maksudnya adalah indikator ini sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan kondisi kelembagaan yang muncul.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif, karena kemampuannya untuk membantu memperjelas gambaran pengelolaan hutan berkelanjutan yang tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan kuantitatif. Dengan ciri serta prinsip dari diatas maka metode ini dipilih. Penelitian ini sangat mengedepankan kita untuk belajar bersama dengan masyarakat dan kemudian kita akan menjadikan komunitas beraktifitas yang sadar dengan pengetahuan mereka tentang hutan kemasyarakatan dan kemudian pembangunan berkeanjutan ini dapat mereka kerjakan secara bersama-sama.

Tahapan Penelitian kemudian dilakukan dengan metode multiangulasi yang melibatkan beberapa metode², yaitu: studi pustaka atau literature, wawancara (*indept interview*), diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), dan observasi lapangan. Pemilihan tehnik pengambilan data dengan beberapa metode ini memperlihatkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan data penelitian disajikan secara diskriptif-eksploratif. Hasil penelitian ini didiskripsikan secara mendalam pada materi

² Sebuah cara pencarian data dan informais dengan melakukan beberapa metode sekaligus, dan kadang metode yang dilakukan dengan

permasalahan dengan segala aspeknya. Proses ini akan dapat dilihat dengan lengkap dalam metode pencarian data daaan pengolahan data dibawah.

Metode kualitatif yang menurut Hadawi Nawawi merupakan penelitian yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasi teoretis (Nawawi, 1983). Sedangkan menurut Sitirios Sarantakos penelitian kualitatif merujuk pada sejumlah pendekatan metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang berbeda (*phenomenology, hermeneutics, dan social interactions*) menggunakan pengumpulan dan analisa data non-kuantitatif dan bertujuan melakukan sebuah telaah mendalam terhadap fenomena itu (Sarantakos, 1993).

Pendekatan dalam pengolahan data yang diskriptif-kualitatif digunakan karena kemampuannya untuk membantu memperjelas gambaran sumber-sumber dan pola pengorganisasian masyarakat dalam melakukan pengembangan Hutan Kemasarakatan (HKm) yang ada yang tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini diharapkan mampu mencari sumber-sumber kegagalan Pengembangan HKm yang berkelanjutan dan peranan yang dapat dimainkan oleh pemerintah serta para aktor lain dalam mengembangkan hutan.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang dipilih, maka tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara beberapa tahap : *Tahap Pertama*, studi Pustaka, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat non-statistika (non-kuantitatif). Metode yang dipakai adalah studi dokumenter atau teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan melalui bahan-bahan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, pemikiran yang berhubungan dengan penelitian. Selama penelitian ini studi pustaka dilakukan baik pada buku teks maupun jurnal yang ada.

Sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai alat bantu dalam operasionalisasi dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan terhadap data pengembangan HKM, pengembangan Hutan berbasis komunitas dan pengembangan hutan yang lestari.

Tahap Kedua Wawancara, setelah melakukan studi pustaka maka dilakukan pemetaan masalah secara detil sehingga permasalahan yang muncul bukan sekedar *common sense*. Hal tersebut menjadi dasar pemilihan alat pengumpulan data dalam tahap awal (*grounded research*). Dengan melakukan wawancara secara mendalam diharapkan memperoleh data yang akurat dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan para pihak, pelaku, penggiat HKM. Para pihak dalam hal ini antara lain pejabat dinas kehutanan, aktivis LSM, pedagang kayu, peneliti dari perguruan tinggi dan terutama komunitas pengembang HKM sendiri

Teknik wawancara mendalam dalam *indepth interview* dilakukan terhadap mereka yang mengetahui, mengkaji, tentang HKM dan atau terlibat dalam lembaga, serta anggota komunitas didalam pengembangan HKM di Gunung Kidul. Wawancara dilakukan pula untuk melakukan *crosscheck* terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya. Menurut Lexi J Moeloeng wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh kekayaan dan pendalaman deskripsi (Moeloeng, 1998). Wawancara sendiri adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moeloeng, 1998).

Sedangkan menurut Irwanti Singarimbun wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam teknik wawancara, pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya (Singarimbun dan Sofian Efendi, ed., 1989). Tehnik wawancara yang digunakan penelitian ini menggunakan

wawancara yang didasarkan pada perkembangan pertanyaan-pertanyaan yang secara spontan dalam sebuah interaksi yang alamiah.

Tahap berikutnya atau tahap ketiga, adalah observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan untuk mencari fakta di lapangan, dengan melihat secara langsung kondisi lapangan maka dapat dipahami keterkaitan antar berbagai permasalahan yang muncul dalam yang telah dilakukan. Observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap setiap penanda yang spesifik yang muncul didalam lingkungan penelitian. Dalam bukunya Jalaludin Rahmat menyatakan bahwa observasi sebagai cara pemilahan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris (Rahmat; 2001). Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dengan tinggal langsung di daerah penelitian yaitu tinggal di Gunung Kidul.

Tahap keempat, Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), FGD dalam penelitian ini adalah melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang didapat dalam *indepth interview*. Pendalaman permasalahan tersebut dilakukan dengan diskusi kelompok yang terarah (*Focus Group Discussion*). Diskusi dengan masyarakat ini dilakukan secara formal dan informal. Diskusi secara formal dilakukan dengan menggunakan sarana berkumpul masyarakat, misalnya pertemuan yang dilakukan oleh Konsorsium KTH (KPHKm). Diskusi ini dilakukan secara terstruktur acaranya, waktu, peserta, dan lokasinya. Sedangkan diskusi secara informal dilakukan secara tidak terstruktur, baik waktu, lokasi, maupun pesertanya.

Diskusi dalam FGD yang terstruktur dilakukan dengan seorang fasilitator dengan dibantu beberapa asisten fasilitator. Berikut rancangan FGD :

- i. Perkenalan dan *Ice Breaking* supaya diskusi dapat dilakukan secara santai dan akrab. Dalam kondisioning ini diharapkan setiap peserta dapat mengungkapkan semua permasalahannya secara terbuka.
- ii. Pertanyaan yang telah dirangkum dari wawancara mendalam yang telah dilakukan. Walaupun disini tidak menutup kemungkinan muncul sebuah permasalahan baru.
- iii. Melakukan pemetaan bersama atas hasil kartu tersebut dengan melakukan penilaian secara bersama-sama.
- iv. Diskusi secara mendalam terhadap pemetaan masalah tersebut, Disini sekaligus dilakukan pula pemetaan tentang aksi serta solusi terhadap masalah yang ada.
- v. Penutup

Diskusi informal dilakukan secara tidak terstruktur karena merupakan tidak lanjut dari diskusi formal. Diskusi informal dilakukan mialnya karena keterbatasan waktu, maupun dilakukan untuk melakukan pendalaman permasalahan tersebut. Sekaligus dilakukan ketika menemukan sebuah permasalahan baru yang dihadapi komunitas.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik penelitian yang beragam namun terintegrasi, sehingga data yang dihasilkan lebih dari satu. Sesuai dengan metode triangulasi yang dilakukan untuk melakukan sebuah pemahaman yang dalam terhadap permasalahan, maka pengolahan secara diskriptif-eksploratif dilakukan secara hati-hati dan cermat. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun,ed; 1989). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menggambarkan peranan para aktor dalam meningkatkan kemanfaatan hutan dalam perspektif SD serta tantangan yang dihadapinya. Proses analisis data dalam

penelitian kualitatif mengandung sejumlah elemen yang berhubungan dengan proses penarikan (Sarantakos; 1993).

Proses analisa data dilakukan dalam tiga langkah (Sarantakos; 1993) . Pertama, *reduksi data*, langkah ini menunjuk pada proses manipulasi, integrasi, transformasi dan penonjolan data ketika ditampilkan. Reduksi data membantu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode, sampai dengan kesimpulan. *Kedua*, pengorganisasian data berkaitan dengan proses penyusunan informasi sesuai dengan topik dan poin tertentu, kategorisasi informasi dalam tema-tema yang lebih spesifik, dan menghadirkan kesimpulan dalam beberapa bentuk. *Ketiga*, interpretasi data. Berkaitan dengan proses pembuatan keputusan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Seluruh Proses penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

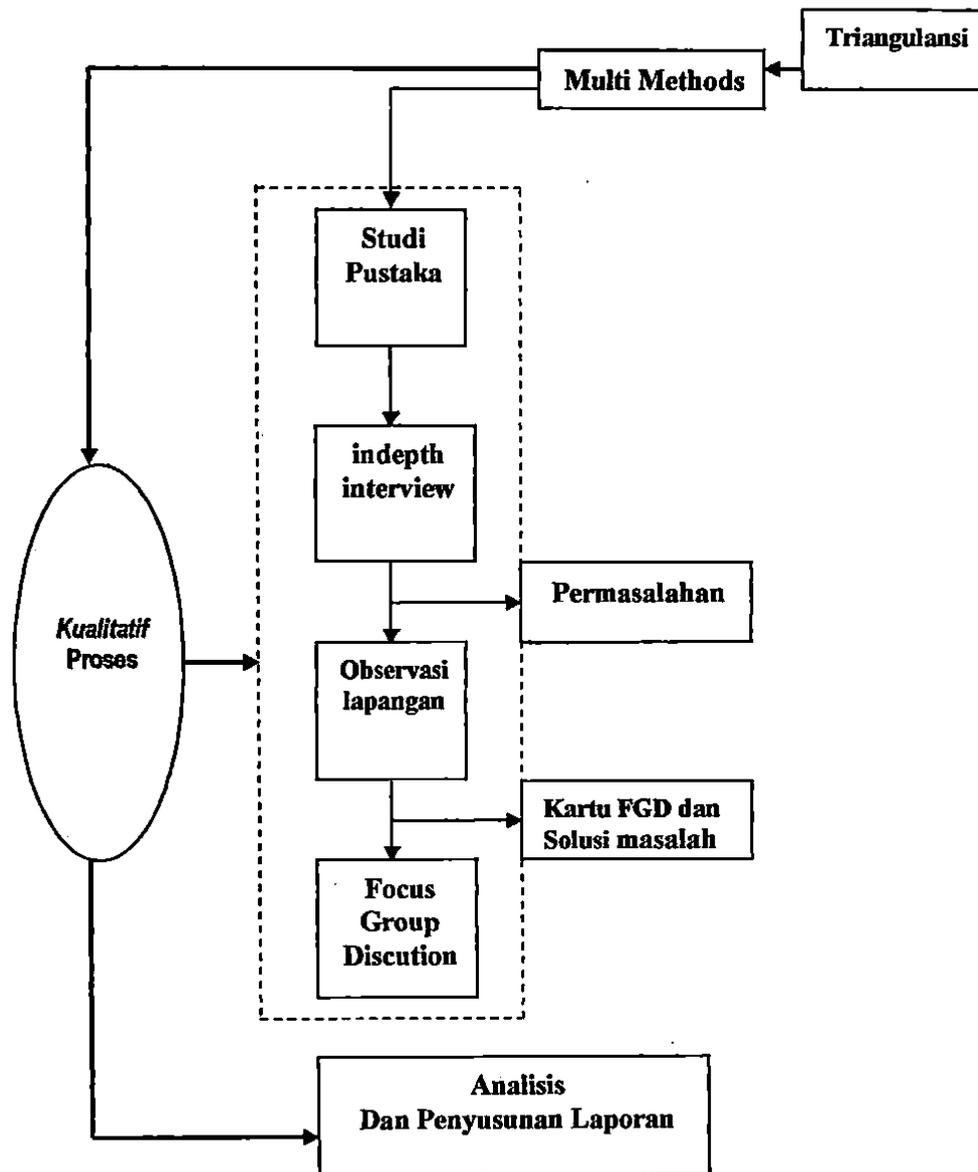


Diagram III
Alur Penelitian

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini mencoba melihat pengembangan HKm yang dikembangkan oleh masyarakat di Gunung Kidul. Melihat pengembangan HKm yang dilakukan dengan melihat kebijakan negara yang mendorong munculnya HKm berkelanjutan maupun mengambil aktivitas warga dalam melakukan partisipasi aktif mendorong pengembangan hutan dengan

... dan penyelesaian berkelanjutan di wilayah mereka

E. Jadwal pelaksanaan

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	April	Jun	Juli
Survey	✓					
Pembuatan proposal		✓				
Studi Pustaka	✓	✓	✓			
<i>Indepth interview</i>				✓		
Observasi lapangan				✓		
Focus Group Discution					✓	
Analisa data						✓
Penyusunan Laporan						✓

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini terdiri direncanakan terdiri dari 5(lima) Bab. **BAB I Pendahuluan.** Berisi tentang pendahuluan yang berisi argumentasi dasar kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Serta berisi tentang metode penelitian yang dipilih dalam penelitian HKm yang sadar *sustainable development*. **BAB II Penguasaan dan pengelolaan hutan pendorong munculnya HKm.** Bab II mendiskripsikan tentang munculnya HKm. Misi penulisan bab ini adalah memberikan gambaran tentang ide dasar yang terkandung di dalam desain kebijakan. Pada bab ini akan dibahas tentang prinsip dan perkembangan pemikiran tentang penguasaan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang menjadi pendorong munculnya HKm. **BAB III Inisiasi Dukungan Kebijakan HKm di Gunung Kidul,** membahas tentang perjalanan kebijakan HKm serta tarik-ulur kebijakan yang muncul antara pemerintah pusat serta daerah. Bab ini melihat kebijakan serta dukungan yang dilakukan di level pusat, yakni Departemen Kehutanan. berikutnya, penjabaran HKm yang dilakukan oleh Pemkab Gunung Kidul, **Bab IV Kesimpulan dan Saran.** Merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil studi ini. Juga akan dikemukakan usulan dan rencana program bagi masyarakat untuk Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat yang berkelanjutan.